

**FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN DAN BENTUK PIDANA DALAM KUHP BARU**

**TESIS**

# Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

**Oleh:**

# Intan Rizki Apriliani NPM. 7221800042

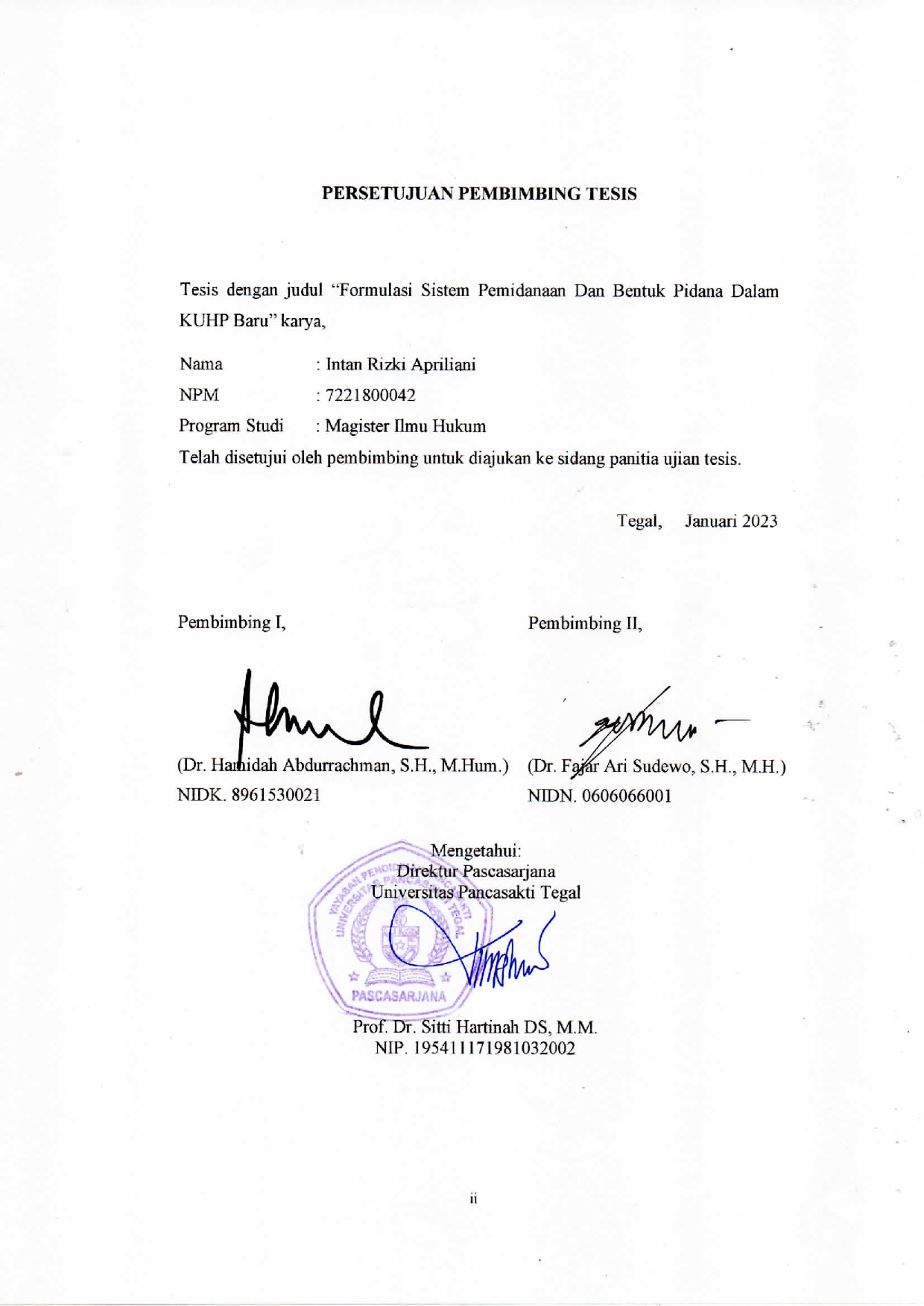
**Pembimbing:**

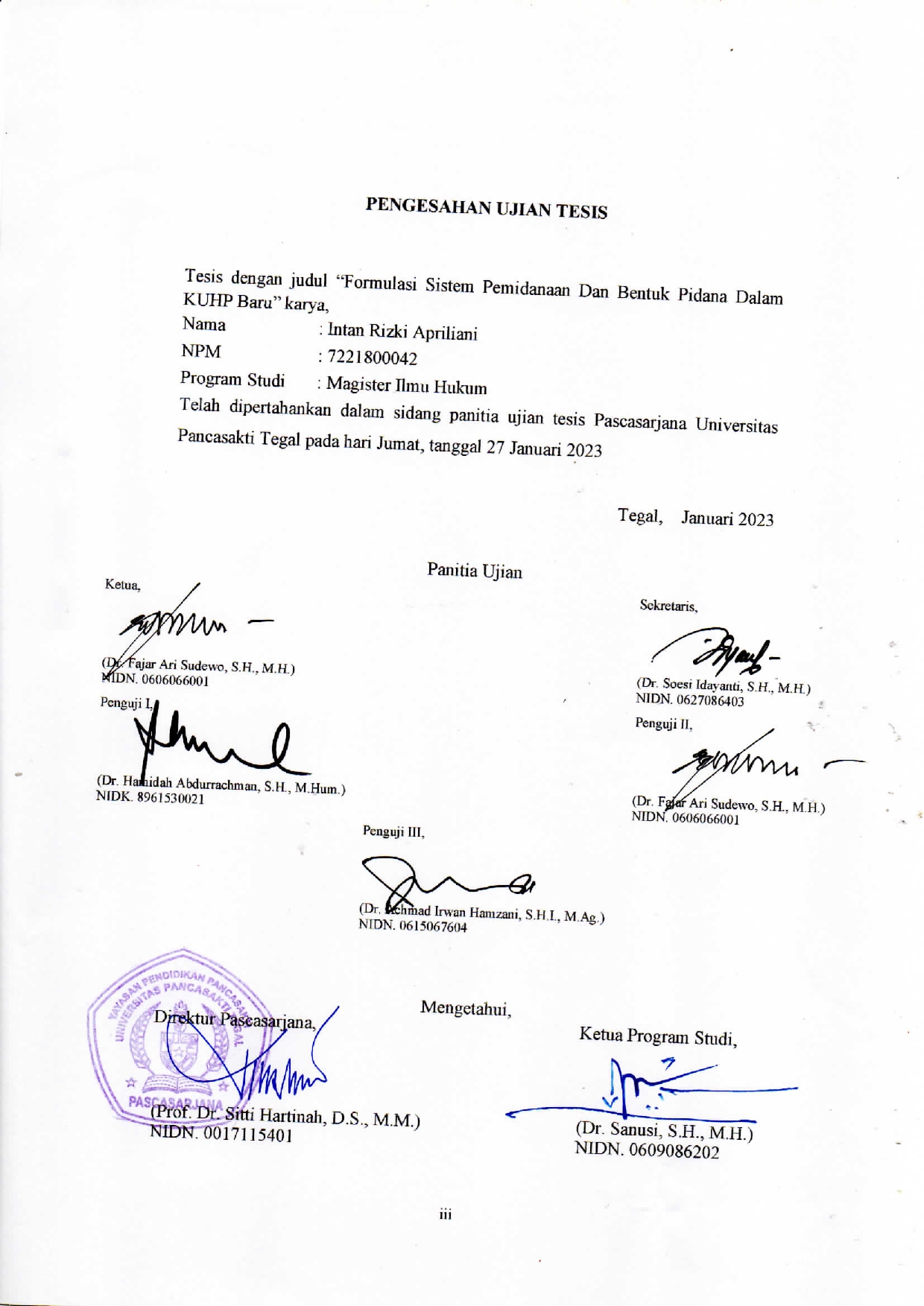
# Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum.

1. **Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA**

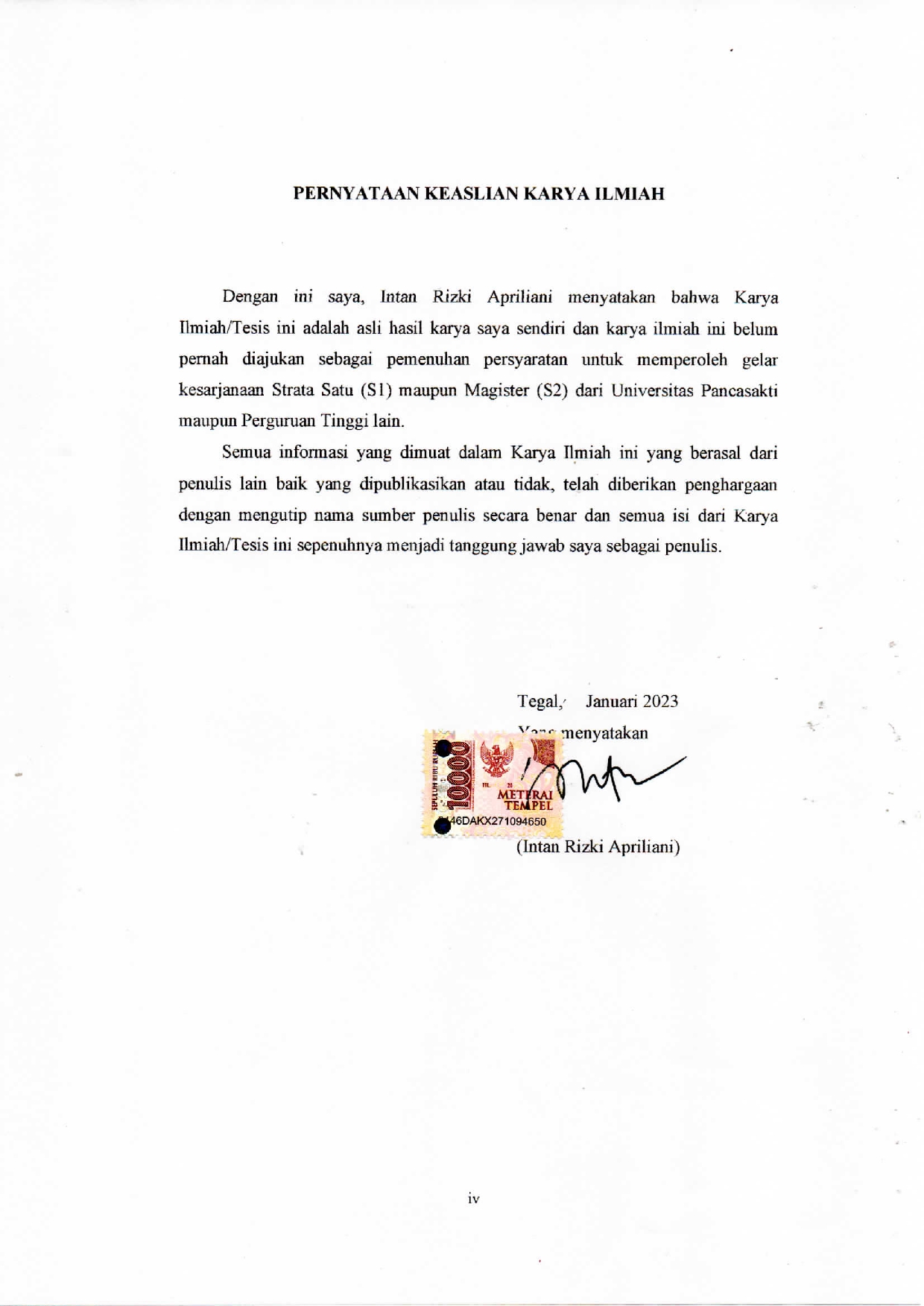
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2023**





# PENGESAHAN UJIAN TESIS

|  |
| --- |
|  |



# Abstrak

Pengaturan hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia. Banyak pasal di KUHP lama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. KUHP baru merupakan wujud dari adanya pembaruan hukum pidana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia dan menganalisa formulasi tentang pidana dalam KUHP baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data disajikan dalam secara naratif-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP lama tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan. Secara sosiologis KUHP lama telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam KUHP baru ketentuan mengenai sistem pemidanaan sudah mengalami pembaharuan yaitu dari jenis dan ukuran penjatuhan pidananya. KUHP baru dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar disebut ide keseimbangan dengan menggunakan pendekatan multi-dimensional sehingga. Jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam KUHP baru yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Pidana mati masih diformulasikan sebagai puncak hierarki terkait jenis pidana dan diancamkan secara alternatif. KUHP baru terdapat jenis sanksi khusus untuk anak yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu dari hal yang baru dalam KUHP baru yaitu pidana kerja sosial dan pidana denda. Dalam KUHP baru juga sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana.

**Kata Kunci:** KUHP Baru, Sanksi, Sistem Pemidanaan

***Abstract***

*The regulation of criminal law is no longer in accordance with developments and technological advances in Indonesia. Many articles in the old Criminal Code were inconsistent with the values prevailing in society. The new Criminal Code is a form of criminal law reform.*

*The purpose of this study is to analyze the development of the penal system in Indonesia and to analyze the formulation of sanctions in the new Criminal Code. The approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach. This research data collection technique was carried out through conventional and online literature searches. The data analysis technique used in this study is qualitative because the data is presented in a narrative-descriptive manner.*

*The results of the research show that the punishment system in the old Criminal Code did not mention the goals and guidelines for sentencing. Sociologically, the old Criminal Code was out of date and was often not in accordance with the values that lived in society. In the new Criminal Code, the provisions regarding the punishment system have undergone renewal, namely the type and size of the sentence imposed. The new Criminal Code is motivated by various ideas which in general are called the idea of balance by using a multi- dimensional approach so that. The types of punishment contained in the new Criminal Code are principal punishment, additional punishment, and special punishment. Death penalty is still formulated as the top of the hierarchy related to the type of punishment and is threatened alternatively. The new Criminal Code contains a special type of sanction for children which consists of the main punishment and additional punishment. One of the new things in the new Criminal Code is social work and fines. The new Criminal Code also regulates corporations as subjects of crime.*

***Keywords:*** *New Criminal Code, Sanctions, Criminal System*

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT., Alhamdulillah penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Prof. Dr. Sitti Hartinah, DS., M.M. (Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Sanusi, S.H., M.H. (Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Kus Riskianto, S.H., M.H. (Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum. (Dosen pembimbing I) dan Dr.

Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.

1. Segenap Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa

menyelesaikan studi Magister. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.

1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan.
2. Segenap staff administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
3. Teman-Teman MIH Angkatan 13 yang saling memberikan dorongan moriil dalam menempuh studi, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Januari 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN TESIS iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

[ABSTRAK v](#_TOC_250023)

[ABSTRACT vi](#_TOC_250022)

[KATA PENGANTAR vii](#_TOC_250021)

[DAFTAR ISI ix](#_TOC_250020)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP xi](#_TOC_250019)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250018)

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250017)
  2. [Rumusan Permasalahan 8](#_TOC_250016)
  3. [Tujuan Penelitian 8](#_TOC_250015)
  4. [Manfaat Penelitian 8](#_TOC_250014)
  5. [Originalitas Penelitian 9](#_TOC_250013)
  6. [Kerangka Konseptual 12](#_TOC_250012)
  7. [Kerangka Teoritis 16](#_TOC_250011)
  8. [Metode Penelitian 19](#_TOC_250010)
  9. [Sistematika Penulisan 26](#_TOC_250009)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 28](#_TOC_250008)

1. [Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana 28](#_TOC_250007)
2. [Sejarah Berlakunya KUHP Di Indonesia 35](#_TOC_250006)
3. [Sistem Pemidanaan Di Indonesia 43](#_TOC_250005)
4. [Teori Pemidanaan 50](#_TOC_250004)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58

1. [Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia 58](#_TOC_250003)
2. Formulasi Tentang Sanksi Dalam KUHP Baru 83

[BAB IV PENUTUP 101](#_TOC_250002)

1. Simpulan 101
2. [Saran 102](#_TOC_250001)

[DAFTAR PUSTAKA 103](#_TOC_250000)

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | Intan Rizki Apriliani |
| NPM | : | 7221800042 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Tegal, 13 April 1992 |
| Program Studi | : | Magister Ilmu Hukum |
| Alamat | : | Jl. K.H. Agus Salim RT. 008 RW. 002 Desa  Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal |
| Instansi | : | Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal |

Riwayat Pendidikan Sebagai Berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Sekolah | Tahun | Lulus/Gelar Yang Dicapai |
| 1. | SDN 02 Tembok Luwung | 1998-2004 | Lulus |
| 2. | SMPN 1 Slawi | 2004-2007 | Lulus |
| 3. | SMAN 1 Tegal | 2007-2010 | Lulus |
| 4. | Fakultas Hukum Universitas Diponegoro | 2010-2014 | Lulus |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2023 Hormat saya,

(Intan Rizki Apriliani)

# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Hukum pidana dapat berfungsi sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana maupun sebagai penyelesaian dari suatu tindak pidana.1 Hukum pidana sebagai penyelesaian atas suatu tindak pidana yang terbukti bersalah di dalam pengadilan akan berujung pada pemberian sanksi yang berupa pidana bagi pelaku yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain.2 Sanksi pidana ini identik dengan sanksi negatif karena sifatnya yang memberikan penderitaan kepada pelaku. Sanksi pidana tersebut bertujuan sebagai upaya menjaga ketenteraman atau keamanan dan pengaturan (kontrol) lebih baik di masyarakat. Keberadaan pidana diposisikan sebagai tahapan sanksi paling terakhir.3

Pidana pertama kali dikenal sejak adanya peraturan *Wetboek van Strafrecht voo Nederlandsch-Indie* (WvSNI) di tanggal 1 Januari 1915 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. WvSNI kemudian dikenal menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau dapat disebut sebagai KUHP lama

1 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020, hlm. 29.

2 Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 15

3 Johan Widjaja dan Budiarsih, “Konsep Sanksi Pidana Yang Memberikan Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan”, *Jurnal Yustitia*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2021. [http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1111/781.](http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1111/781)

berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Hukum pidana Indonesia sejak kemerdekaan ditandai dengan tiga tahapan perkembangan hukum pidana dan pemidanaan, yaitu 1) mempertahankan hukum pidana yang berlaku pada masa kolonial dengan beberapa penyesuaian sebagai hukum yang diberlakukan di negara Indonesia yang sudah merdeka; 2) menempatkan KUHP lama sebagai hukum pidana nasional dan mencegah terjadinya pengembangan hukum pidana di luar KUHP lama, kecuali hukum pidana di bidang hukum administrasi; dan 3) mengembangkan hukum pidana di luar KUHP lama dan membentuk sistem norma hukum pidana dan pemidanaan sendiri dan menyimpangi atau melepaskan diri dari asas-asas umum hukum nasional sebagaimana yang dimuat dalam Buku I KUHP lama. Perkembangan tiga tahap tersebut yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana dan pemidanaan.

Perkembangan tersebut akhirnya menjadikan sistem ganda dalam hukum pidana dan pemidanaan, yaitu sistem hukum pidana dan pemidanaan dalam KUHP lama dan sistem hukum pidana dan pemidanaan dalam undang-undang yang tersebar di luar KUHP lama. Adanya sistem ganda tersebut menyebabkan terjadinya duplikasi norma hukum pidana dan sebagian ada yang triplikasi norma hukum pidana yang terpilah-pilah dan tidak terintegrasi dalam suatu sistem norma hukum pidana.

Keadaan norma hukum pidana tersebut berimbas kepada sistem perumusan ancaman sanksi pidananya yang tidak dibentuk berdasarkan standar

norma pemidanaan dalam suatu sistem pemidanaan atau perumusan ancaman sanksi pidana. Sistem perumusan ancaman sanksi pidana menjadi tidak konsisten dan bahkan mengembangkan ancaman pidana minimum khusus dari perhitungan hari, bulan, dan tahun yang apabila dihubungkan dengan norma hukum pidana (delik) tidak memiliki standar pengancaman pidana yang jelas atau sistematik. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohasion intact*). Kenyataannya mekanisme pemidanaan yang ada saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat.

Penetapan pidana dalam suatu perundang-undangan pidana bukan sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundangan-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada serta masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya pembaruan hukum pidana. Sistem hukum pidana yang selama ini ada, terutama yang berasal atau diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial pada umumnya bersifat *obsolete and unjust* (telah usang dan tidak adil) serta *outmoded and unreal* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan.

Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP lama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.4 Hal ini dikarenakan KUHP lama tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP lama tidak memadai dan ketinggalan oleh zaman.

Hukum pidana ditempatkan sebagai hukum sanksi penjatuhan pidana sebagai parameter keadilan dihubungkan dengan persoalan kehidupan yang nyata, model penyelesaian menjadi tidak realistis karena penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan ialah sanksi pidana penjara. Penderitaan fisik, psikis, kehilangan anggota keluarga, harta benda, kehormatan, serta problem sosial dan kemanusiaan lainnya akibat kejahatan tidak menjadi perhatian dalam hukum pidana.

Namun apa yang terjadi saat ini pada pelaku kejahatan, hampir dari keseluruhan kejahatan-kejahatan tidak pernah terbendung dan semakin bertambah. Pidana penjara membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lembaga Pemasyarakatan seringkali dijadikan sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Dengan lahirnya para penjahat yang lebih profesional ini pada akhirya juga akan menambah beban kepada masyarakat karena timbulnya ancaman yang lebih

4 Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/11090/5553.

besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama masyarakat kehilangan kemerdekaannya. Selain kurang efektifnya sanksi pidana yang diterapkan, ada faktor lain yang muncul dari pelaku yaitu tidak adanya rasa malu yang dimiliki oleh para pelaku setelah melakukan kejahatannya. Justru semakin menambah keberanian pelaku untuk bertindak, tanpa memperhatikan rasa bersalah dan malu yang telah diperbuatnya.

Pidana perampasan kemerdekaan semakin lama tidak disukai karena pidana ini memiliki dampak negatif yang besar tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut. Pertimbangan ekonomis melihat bahwa anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan tersebut tidaklah sedikit. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain meliputi biaya hidup narapidana seperti biaya makan, biaya pakaian serta lain sebagainya yang mana dari waktu ke waktu memperlihatkan angka yang cukup besar.5

Pemidanaan dengan cara pemenjaraan perlu dikritisi dengan membandingkannya dengan fakta mengenai efektivitasnya bagi narapidana di Indonesia. Berdasarkan data yakni tahun 2017-2020 dapat diketahui bahwa telah terjadi over kapasitas hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam hal ini efektivitas pemenjaraan sebagai sarana dalam

mencapai tujuan pemidanaan masih perlu dipertanyakan kembali.

5 Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi, 2020, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 8, Nomor 1, April 2020. [https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/726/pdf\_140.](https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/726/pdf_140)

Meskipun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan dan meskipun sebutan dari rumah penjara sudah diganti dengan sebutan lapas, namun, dalam praktik, gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas dan sarana yang memadai. Selain itu, lapas di Indonesia saat ini juga sudah kelebihan penghuni (*over capacity*). Kelebihan tingkat hunian tersebut merupakan permasalahan utama yang dihadapi lapas dan rumah tahanan saat ini, terutama di Pulau Jawa. Tingkat hunian yang sudah melebihi daya tampung ini sangat menyulitkan baik dalam segi pembinaan, pengawasan, maupun pemeliharaan sanitasi para warga binaan itu sendiri.

KUHP lama yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk warisan kolonial Belanda yang cenderung bersifat liberal.6 Di sisi lain, di negara asalnya, KUHP tersebut sebenarnya telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hukum pidana di Indonesia perlu mengalami pembaharuan.7 Usaha untuk mewujudkan pembaruan hukum pidana telah dimulai sejak tahun 1963 dengan disusunnya rancangan undang-undang hukum pidana dalam suatu kitab hukum pidana atau KUHP.

Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Masa pembaruan hukum pidana Indonesia

6 Helmalia Cahyani dan Intan Nurul Firdaus, “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022. https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/download/175/164.

7 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525/397.

harus dijadikan pijakan untuk merombak hukum pidana Indonesia yang masih berbau kolonial. Pembaruan hukum pidana meliputi pembaruan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

KUHP baru merupakan wujud dari adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pembaruan dilakukan karena adanya alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. KUHP lama yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda perlu diganti karena landasan filosofisnya yang berbeda. Secara sosiologis, banyak pasal di KUHP lama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat serta adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat berbagai pengaturan tindak pidana di dalam KUHP lama tidak memadai dan ketinggalan zaman.8

KUHP baru bertujuan untuk penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan undang-undang biasa yang sering dibuat selama ini. Perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai penyusunan undang-undang biasa dan penyusunan KUHP baru. Penyusunan undang-undang biasa bersifat parsial atau fragmenter yang pada umumnya hanya mengatur delik khusus atau tertentu, masih terikat pada sistem induk WvS, hanya merupakan sub sistem, tidak membangun atau merekonstruksi sistem hukum pidana, sedangkan penyusunan KUHP baru

8 Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090.

bersifat menyeluruh atau integral, mencakup semua aspek, menyusun atau menata ulang (rekonstruksi atau reformulasi) rancang bangun sistem hukum pidana nasional dan terpadu.

Berdasarkan hal di atas maka penelitian berbentuk tesis yang berjudul Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru ini dimaksudkan untuk membahas mengenai sistem pemidanaan dan pengaturan pidana yang ada di dalam KUHP baru.

# Rumusan Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

* 1. Bagaimana perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia?
  2. Bagaimana formulasi tentang pidana dalam KUHP baru?

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Menganalisa perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia.
  2. Menganalisa formulasi tentang pidana dalam KUHP baru.

# Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

* 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, meliputi dua hal, yaitu (1) erat kaitannya dengan riset di bidang

filsafat hukum dan sejarah hukum, (2) erat kaitannya dengan pemahaman dan pengembangan hukum nasional.

* 1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan dan pembentukan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

# Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama.

Penulis mengambil 3 (tiga) penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan penelitian dari penulis. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaannya. Akan lebih mudah dipahami jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Peneliti,  Tahun dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Originalitas Penelitian |
| 1. | Kiswoyo, 2021,  Perbandingan | Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisa | Peneliti akan fokus  merumuskan pada |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem Pidana Denda Dalam Kitab Undang-  Undang Hukum Pidana Dan Rancangan  Undang-Undang Tentang  Kitab Undang-  Undang Hukum Pidana. | pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk menganalisa perbandingan sistem pidana denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang- Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana. | perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia dan formulasi tentang pidana dalam KUHP baru. |
| 2. | Ahmad Bahiej, 2017,  Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RUU KUHP  Indonesia. | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan jenis pidana dan tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia serta RUU KUHP Indonesia. | Peneliti akan fokus merumuskan pada perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia dan formulasi tentang pidana dalam KUHP baru. |
| 3. | Bakhtiyar Rahman,  2009, | Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui | Peneliti akan fokus  merumuskan pada |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perbandingan Asas Legalitas Dalam  Kitab Undang-  Undang Hukum  Pidana (KUHP) Dengan Rancangan Kitab Undang-  Undang Hukum Pidana (RKUHP). | perbandingan antara asas legalitas yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam hal persamaan dan perbedaan serta  kelebihan dan  kekurangan yang terdapat dalam kedua KUHP tersebut. | perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia dan formulasi tentang pidana dalam KUHP baru. |

Dapat disimpulkan berdasar hasil 3 (tiga) penelitian tesis di atas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti akan fokus merumuskan pada perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia dan formulasi tentang pidana dalam KUHP baru. Adapun penelitian Kiswoyo (2021) fokus pada perbandingan sistem pidana denda, penelitian Ahmad Bahiej (2017) fokus pada perbandingan jenis pidana dan tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia serta RUU KUHP Indonesia, dan penelitian Bakhtiyar Rahman (2009) fokus pada perbandingan asas legalitas.

# Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan abstraksi atau ringkasan yang terbentuk berdasarkan generalisasi dari hal-hal yang khusus, sehingga konsep hanya dapat diukur atau diamati melalui konstruksi yang dikenal dengan sebutan variabel. Diperlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertahankan kebenarannya. Kerangka konseptual didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

* 1. Sistem Pemidanaan

Secara harfiah sistem pemidanaan terdiri dari dua kata yaitu sistem dan pemidanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana. Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana. Oleh sebab itu sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi.9

9 Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, “Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap”, *Pandecta*, Volume 16, Nomor 1, Juni 2021. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/27516/11951.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

* + 1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
    2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
    3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana.
    4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya atau berfungsinya atau prosesnya, dapat diartikan sebagai:

* 1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana.
  2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian di atas menunjukan bahwa sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan keseluruhan sub sistem hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana materil atau substantif, sub sistem pidana formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub sistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakan secara konkret hanya dengan salah satu sub sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

1. Sudut Norma-Substantif

Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

* 1. Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan.
  2. Keseluruhan sistem aturan atau norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang- undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

2. Pidana

Pengertian tindak pidana dalam bahasa Belanda berasal dari kata *starbaar feit* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan beragam istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang bisa dihukum serta makna lain sebagainya.10 Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena

10 Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 3.

hukuman lain dari pihak berwajib. Menetapkan pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan.11

Pidana yaitu suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya.

Pada dasarnya Pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Jenis- jenis pidana tertulis di dalam Pasal 64 KUHP baru. Jenis-jenis pidana ini

11 Kartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2019. [http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3181/2480.](http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/3181/2480)

berlaku pula pada delik yang tertulis di luar KUHP baru, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.12

# Kerangka Teoritis

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti.

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setujui atau tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca. Proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan teori yang relevan serta menyusun kerangka teoritis atau kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting apabila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Teori hukum adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas karena secara murni.13

12 Saptono Rahardjo, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2018, hlm. 636.

13 Dewa Gede Atmaja, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 9.

Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian.14 Teori hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan.

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan. Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Teori pemidanaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

* 1. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang

14 Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 303.

tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori retributif mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

* 1. Teori Relatif atau Teleologi

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

* 1. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dan dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana. Belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.

# Metode Penelitian

Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut selalu dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal- hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang berguna menentukan, menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun

serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum adalah metode normatif, yaitu metode doktrinal.15

Metode penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang digunakan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

* 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh.

* 1. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum memiliki karakter tersendiri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif itu yang dianggap substansial dalam

15 Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 15.

mempelajari ilmu hukum, dikarenakan tidak akan dipelajari dalam ilmu sosial lainnya yang objeknya sama yakni hukum.

Hal substansial dari ilmu hukum yaitu sifat presktiptifnya tersebut. Perbincangan awal dari substansi ilmu hukum yaitu mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat, artinya ilmu hukum masuk menusuk ke suatu hal yang esensial yaitu sisi intrinsik dari hukum.

* 1. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:

* + 1. Pendekatan kasus (*case approach*)
    2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
    3. Pendekatan historis (*historical approach*)
    4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
    5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

hukum yang diketengahkan.16 Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Pendekatan perundang- undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensif* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
2. *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep- konsep yang digunakan.17 Adapun pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang

terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha

16 Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 110.

17 Irwansyah, *Op. Cit.* hlm. 147.

untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.

1. Sumber Data

Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting*.18 Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. Data sekunder di bidang hukum dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.19

* 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas). Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, catatan resmi,

18 Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 46.

19 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi I, Juni 2020. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

* + 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
  1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, disertasi hukum, tesis hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.20

* 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.21 Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
2. Kamus hukum.
3. Situs internet yang berkaitan dengan Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Pidana Dalam KUHP Baru.

20 Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op. Cit*., hlm. 52.

21 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 8, Nomor 8, Tahun 2021. [http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191.](http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191)

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Pada penelitian kualitatif ada empat teknik untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu studi kepustakaan, wawancara, angket dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Formulasi Sistem Pemidanaan Dan Bentuk Sanksi Dalam KUHP Baru.

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma

hukum yang ada dalam masyarakat. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi.

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

# Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian ini, pembahasan materi selanjutnya akan dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan di dalam masing-masing bab yang dimaksud secara substansial

Bab I Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis, meliputi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, originalitas penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan umum tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana, tinjauan umum tentang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, tinjauan umum tentang sistem pemidanaan di Indonesia dan tinjuan umum tentang teori pemidanaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia dan formulasi tentang pidana dalam KUHP baru.

Bab IV Penutup. Penutup merupakan bagian terakhir dan memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

# Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya.

Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya. Salah satu fungsi dari hukum pidana yaitu sebagai pemberi dasar legitimasi bagi negara guna mengenakan tindakan berupa sanksi pidana bagi mereka yang melanggar larangan undang-undang sebagai tindak pidana.22

22 R. Muhamad Ibnu Mazjah, “Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial”, *Negara Hukum*, Volume 12, Nomor 2, November 2021.

https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2335/pdf.

28

Unsur-unsur tindak pidana meliputi:23

* 1. Subjek.
  2. Kesalahan.
  3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).
  4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
  5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini

mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang- undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.24 Istilah pada hukum pidana ini mulai digunakan pada zaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata *strafrecht* atau *straf* yang diterjemahkan dengan kata pidana, yang artinya hukuman, sedangkan *recht* diterjemahkan dengan kata “hukum” dan pada dasarnya identik dengan perkataan “*ius*” dalam bahasa Romawi.

Penyebutan kata *recht* tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan hak maka demikian pula dengan *strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusan untuk bertingkah laku dilanggar, sedangkan *strafrecht* (hukum pidana) dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti obejektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat

dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.25 Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai hukum pidana,

antara lain sebagai berikut:

1. Moelyato, menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan untuk:
   1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
   2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
   3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subside. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena

itu hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan alasan pembenar (*justification*) pidana itu.

1. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat diasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan perasaan hukum pada masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita- citakan masyarakat, sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
   1. Hukum pidana sebagai hukum positif.
   2. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya
2. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diuar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.26
3. Sudikno Mertokusumo, hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta

26 Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 5.

sanksisanksi apa sajakah yang tersedia. Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

* 1. Hukum pidana materil, adalah hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi.
  2. Hukum pidana formil, adalah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakan hukum pidana materil, misalnya terjadi pembunuhan bagaimana cara untuk mengusutnya, dengan mengajukannya ke pengadilan, mengadilinya, memutuskannya sampai dengan pelaksanaan putusan.

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi praktiknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli di dalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.

Hukum pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan

dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan masa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ruang lingkup hukum pidana yang luas, meliputi hukum pidana materiil (substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).

1. *Ius Poenali* (hukum pidana materiil)

Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

1. *Ius Poenandi* (hukum pidana formil)

Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut cara atau proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan pertanggungjawaban atas suatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan realisasi hukum pidana substantif atau materil, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHP. Hak-hak negara tersebut meliputi:

* 1. Hak untuk mengancam hukuman.
  2. Hak untuk menjatuhkan hukuman.
  3. Hak untuk melaksanakan hukuman.

# Sejarah Berlakunya KUHP Di Indonesia

Tidak dipungkiri hukum pidana di Indonesia merupakan produk dari barat. Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah KUHP. KUHP di Indonesia mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrech Voor Nederlandsch Indie* (WvSNI), merupakan titah raja atau *Koninklijk Besluit* pada 15 Oktober 1915. Titah raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belanda, sehingga dengan titah raja tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum di Indonesia. Walaupun WvSNI turunan (*copy*) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan

disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Jika diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland.* Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Code Penal* itu sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *Wetboek van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal Napoleon.*

Sejarah hukum pidana Indonesia sebagaimana semula adalah merupakan *Code Napoleon Perancis* tahun 1810. Perancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Kolonisasi kemudian berlaku di Belanda. Belanda memberlakukan KUHP pada tahun 1881 dan dibawa ke Indonesia. KUHP itu lalu menggusur seluruh hukum yang ada di nusantara, dari hukum adat, hingga hukum pidana agama. Nilai-nilai lokal tergerus hukum penjajah.

Efektif KUHP berlaku secara nasional sejak 1 Januari 1918. KUHP mulai berlaku di Pulau Jawa dan Madura pada tanggal 26 Februari 1946, sedangkan di daerah lain, KUHP mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958. Oleh karena itu, KUHP berlaku secara nasional di Indonesia sejak tanggal 29

September 1958.27 KUHP ini merupakan salinan dari WvS Belanda yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886.28

KUHP yang berlaku setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah KUHP warisan zaman Hindia Belanda dengan perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan dapat disebut KUHP.

Di samping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selama lebih dari seratus tahun sejak KUHP Belanda diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warga negara yang berbeda tetap diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut menjadi sumber hukum

27 Duwi Handoko, “Klasifikasi Dekriminalisasi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019.

https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/622/pdf.

28 Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Umrah Press, 2020, hlm. 5.

pidana sampai dengan saat ini. Pembentukan KUHP nasional ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang menjadi karya agung bangsa. Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan sebuah turunan dari *Nederland Strafwetboek* (KUHP Belanda).29 Sudah menjadi konsekwensi ketika berlaku asas konkordansi terhadap peraturan perundang-undangan.

KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari *Code Penal Perancis*. *Code penal* menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan kekaisaran Perancis. Desakan pembentukan segera KUHP nasional sebagai sebuah negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing, hukum yang berlaku di Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di negara penjajah tersebut. Negeri Belanda yang merupakan negeri dengan sistem hukum kontinental menurunkan bentuknya melalui asas konkordansi. Peraturan yang berlaku di negara jajahan harus sama dengan aturan hukum negeri Belanda. Hukum pidana (*straffrecht*) merupakan salah satu produk hukum yang diwariskan oleh penjajah.

Sistematika KUHP (WvS) terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Perinciannya adalah sebagai berikut:

* 1. Buku Kesatu tentang Aturan Umum yang terdiri dari 9 bab 103 pasal (Pasal 1 sampai Pasal 103).

29 Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kepel Press, 2019, hlm. 335.

* 1. Buku Kedua tentang Kejahatan yang terdiri dari 31 bab 385 pasal (Pasal 104 sampai Pasal 488).
  2. Buku Ketiga tentang Pelanggaran yang terdiri dari 9 bab 81 pasal (Pasal 489 sampai Pasal 569).

Aturan Umum yang disebut dalam Buku Pertama Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi Buku Kedua (Kejahatan), Buku Ketiga (Pelanggaran), dan aturan hukum pidana di luar KUHP kecuali aturan di luar KUHP tersebut menentukan lain.

Pada tahun 1965 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional memulai suatu usaha pembentukan KUHP baru. Pembaharuan hukum pidana Indonesia harus segera dilakukan. Sifat undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial menjadi landasan dasar ide pembaharuan KUHP. KUHP yang masih berlaku hingga saat ini merupakan produk kolonial yang diterapkan di negara jajahan untuk menciptakan ketaatan. Indonesia yang kini menjadi negara yang bebas dan merdeka hendaknya menyusun sebuah peraturan pidana baru yang sesuai dengan jiwa bangsa.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio- filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-

nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yaitu dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Ke dua, pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana. Pembaharuan KUHP secara parsial atau tambal sulam yang pernah dilakukan Indonesia adalah dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (merubah nama WvSNI menjadi WvS atau KUHP, perubahan beberapa pasal dan krimininalisasi delik pemalsuan uang dan kabar bohong).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (menambah jenis pidana pokok berupa pidana tutupan).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi (menambah kejahatan praktik dokter).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI dan Mengubah KUHP (menambah kejahatan terhadap bendera Republik Indonesia).

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP (memperberat ancaman pidana Pasal 359, 360, dan memperingan ancaman pidana Pasal 188).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP (merubah *vijf en twintig gulden* dalam beberapa pasal menjadi dua ratus lima puluh rupiah).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Dalam Ketentuan- Ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (hukuman denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (penambahan Pasal 156a).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian (memperberat ancaman pidana bagi perjudian (Pasal 303 Ayat (1) dan Pasal 542) dan memasukannya Pasal 542 menjadi jenis kejahatan (Pasal 303 bis)).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian

dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana atau Prasarana Penerbangan (memperluas ketentuan berlakunya hukum pidana menurut tempat (Pasal 3 dan 4), penambahan Pasal 95a, 95b, dan 95c serta menambah Bab XXIX A tentang Kejahatan Penerbangan).

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara (menambah kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a-f).

Usaha pembaharuan KUHP secara menyeluruh atau total dimulai dengan adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan. Pada tahun 1964 dikeluarkan Konsep KUHP pertama kali.

Pada tahun 2004, tim baru pembuatan RUU KUHP dibentuk. RUU KUHP tersebut baru diserahkan oleh pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas 8 (delapan) tahun kemudian atau pada tahun 2012. Dewan Perwakilan Rakyat periode tahun 2014-2019 kemudian menyepakati draf RUU KUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, timbul berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal RUU KUHP muncul dari masyarakat, termasuk dari para pegiat hukum dan mahasiswa.

Pada September 2019, pemerintah memutuskan untuk menunda pengesahan RUU KUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal

yang bermasalah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat lalu secara resmi kembali melanjutkan pembahasan RUU KUHP bulan pada April 2020. Pembahasan pun terus bergulir hingga saat ini. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draf RUU KUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. Dewan Perwakilan Rakyat lalu menargetkan RUU KUHP disahkan bulan Juli 2022. Namun, RUU KUHP batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Selain itu, penolakan terhadap sejumlah pasal RUU KUHP yang dianggap bermasalah masih terjadi hingga saat ini.

# Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Secara harfiah sistem pemidanaan terdiri dari dua kata yaitu sistem dan pemidanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana. Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Arti lain dari pemidanaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefinisikan sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit.

Lebih lanjut dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai makna *sentence* atau *veroordeling*. Patut dicatat bahwa pengertian sistem pemindanaan tidak hanya dilihat dalam arti sempit atau formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas atau materiil. Dalam arti sempit atau formal, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas atau material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van starfrecht voor Nederlandsch Indie* (WvS NI). WvS NI

ditetapkan sebagai hukum pidana materil di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum dan secara resmi diberi nama KUHP.30

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

* 1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
  2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil atau subtantif, Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut- turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

30 Andri Rinanda Ilham, “Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan”, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2020.

https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/1924/pdf\_1.

Hukum pidana materil dan hukum pidana formil dibedakan sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Sistem pemberian atau penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

1. Sudut Fungsional

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya, dapat diartikan sebagai:

* 1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
  2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana.

Pengertian di atas menunjukan bahwa sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan keseluruhan sub sistem hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana materil atau substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub sistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

1. Sudut Norma-Substantif

Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:

* 1. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan.
  2. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana material untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang- undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat di dalam Buku I

KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu dan juga memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.31

Perumusan tindak pidana di dalam aturan khusus hanya merupakan sub- sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Artinya, perumusan tindak pidana baik unsur-unsurnya, jenis tindak pidananya, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem yang berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, dioperasionalkan dan difungsikan, perumusan tindak pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem

lainnya, yaitu sub-sistem aturan atau pedoman dan asas-asas pemidanaan yang

31 Ali Dahwir, “Pengembanan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”,

*Jurnal Unpal*, Volume 17, Nomor 1, Januari 2019. https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/143/112.

ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus di dalam undang-undang khusus yang bersangkutan.

KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran, artinya kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan di dalam undang-undang khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya, sebab apabila tidak disebutkan, akan menimbulkan masalah yuridis dalam menerapkan aturan umum KUHP terhadap undang-undang khusus itu. Di dalam produk legislatif selama ini, banyak sekali undang-undang yang tidak menyebutkan atau menetapkan kualifikasi yuridis tindak pidana.

Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pemidanaan merupakan suatu proses kebijakan yang melalui beberapa tahap:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuatan undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana maka di dalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Maksud tujuan pemidanaan adalah:
   1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
   2. Membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
   3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
   4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
2. Pemidanaan bertujuan untuk:
   1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
   2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
   3. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
   4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

# Teori Pemidanaan

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan. Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana.32

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana. Hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “*A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt*”. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai ”dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.

32 Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

Pemidanan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutusberatkan tentang hukumnya. Menetapkan atau memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dan lainnya), sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya.

Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerapkali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian *sentence conditionaly* atau *voorwaardelijk veroordeeid* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.

Tujuan pemidanaan di dalamnya tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat.33 Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat, karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali

33 Roby Anugrah, “Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 8, Nomor 1, Februari 2019.

bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang-undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.

Teori pemidanaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan suatu negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

* 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori retributif mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.

Menurut teori ini, hukuman diberikan karena pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori ini, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik.

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

* 1. Teori Relatif atau Teleologi (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori ini menunjukan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*detterence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

* 1. Teori Gabungan atau Modern (*Vereningings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini

mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

* + 1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
    2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
    3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya

Teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan, sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk didapatnya dan dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana. Belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.34

34 H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 117